

PERATURAN DESA KUPANG

NOMOR 07 TAHUN 2025

Tentang

APBDes 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

PEMERINTAH DESA KUPANG

Jln. Balai Desa Kupang No. 01 Desa Kupang Kecamatan Jabon

Kabupaten Sidoarjo - 61276



KEPALA DESA KUPANG
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KUPANG
NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 januari sampai 31 desember;
 - b. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja tersebut merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang berisi tentang semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, maka wajib ditetapkan dengan peraturan desa;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Kupang Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
22. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
33. Peraturan Desa Kupang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kupang Tahun 2020 Nomor 03);
34. Peraturan Desa Kupang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kupang Periode 2018 - 2024 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2018 Nomor 03) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Desa Kupang Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kupang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2018-2026 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2024 Nomor 2);
35. Peraturan Desa Kupang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kupang Tahun 2026 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2025 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kupang Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa	: Rp.	65.416.000,00
Pendapatan Transfer		
- Dana Desa	: Rp.	1.058.417.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp.	572.411.445,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP)	: Rp.	784.943.496,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHR)	: Rp.	28.354.664,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp.	2.509.542.605,00

2. Belanja Desa

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp.	1.357.301.245,16
- Bidang Pembangunan	: Rp.	424.014.001,90
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	206.800.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	244.726.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana	:Rp.	<u>176.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	: Rp.	2.408.841.247,06
Surplus	: Rp.	100.701.357,94

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan (SILPA)	: Rp.	84.038.642,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>184.701.357,94</u>
Jumlah Pembiayaan	: (Rp.	100.701.357,94)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA KUPANG,



Lembaran Desa Kupang Tahun 2025 Nomor 07

LAMPIRAN SISKEUDES

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUPANG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.416.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.444.126.605,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.509.542.605,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	808.636.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.153.885.247,06	
5.3.	Belanja Modal	270.320.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.408.841.247,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.701.357,94	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.038.642,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.038.642,06	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.740.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	184.740.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(100.701.357,94)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kupang, 29 Desember 2025

 KEPALA DESA
 KUPANG
 MUKHAMAD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUPANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.416.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.444.126.605,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.509.542.605,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.357.301.245,16	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.022.310.545,16	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	466.560.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	466.560.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	163.300.545,16	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.300.545,16	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.074.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.074.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	21.496.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	21.496.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	160.380.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	160.380.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	6.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	30.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	73.778.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service, ST NK, BPKB, dll)	24.778.700,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.778.700,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.500.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	128.154.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	29.584.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.584.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	29.500.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.510.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.510.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.600.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.200.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.760.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	38.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	131.558.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	550.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	550.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	4.200.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	126.808.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.808.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>424.014.001,90</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.400.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	17.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	321.889.001,90	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	203.894.893,90	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.894.893,90	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	41.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.594.108,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.594.108,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	34.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.145.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	67.145.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	66.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.580.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	5.580.000,00	DDS, PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>206.800.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.000.000,00	PBH
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	14.800.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	150.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	122.000.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	28.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.200.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>244.726.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	229.726.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	149.726.000,00	DDS, PBH
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.456.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	147.270.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>176.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.408.841.247,06	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	100.701.357,94	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.038.642,06	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.740.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(100.701.357,94)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kupang, 29 Desember 2025

KEPALA DESA
MUKHAMAD

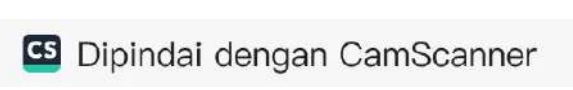
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUPANG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa			65.416.000,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			1.000.000,00		
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			1.000.000,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa			64.416.000,00		
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			64.416.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer			2.444.126.605,00		
4.2.1.	Dana Desa			1.058.417.000,00		
4.2.1.01	Dana Desa			1.058.417.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			813.298.160,00		
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			813.298.160,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			572.411.445,00		
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			572.411.445,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00		
4.3.6.	Bunga Bank			0,00		
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN			2.509.542.605,00		
5.	BELANJA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.357.301.245,16		
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.022.310.545,16		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	72.000.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			72.000.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	466.560.000,00	ADD, PBH
1.01.02	Belanja Pegawai			466.560.000,00	
1.01.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			466.560.000,00	
1.01.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			388.800.000,00	
1.01.02	Tunjangan Perangkat Desa			77.760.000,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	17	Paket	163.300.545,16	ADD, DLL, PAD, PBH, PE
1.01.04	Belanja Barang dan Jasa			163.300.545,16	
1.01.04.	Belanja Barang Perengkapan			30.461.949,01	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9.044.585,33	
1.01.04.	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik			4.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			3.528.600,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.904.763,68	
1.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.984.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			85.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			16.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			55.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas			27.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			12.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			15.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.000.000,00		
1.01.04.5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			10.000.000,00		
1.01.04.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.138.596,15		
1.01.04.5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			10.138.596,15		
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD		1 Tahun	67.800.000,00	ADD	
1.01.05.5.1.	Belanja Pegawai			52.200.000,00		
1.01.05.5.1.4.	Tunjangan BPD			52.200.000,00		
1.01.05.5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			52.200.000,00		
1.01.05.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.600.000,00		
1.01.05.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.600.000,00		
1.01.05.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.600.000,00		
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		3 Paket	8.074.000,00	PBH	
1.01.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.074.000,00		
1.01.06.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			8.074.000,00		
1.01.06.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.824.000,00		
1.01.06.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			1.750.000,00		
1.01.06.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00		
1.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		1 Paket	6.000.000,00	PBH	
1.01.07.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00		
1.01.07.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00		
1.01.07.5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			6.000.000,00		
1.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		2 Paket	20.700.000,00	DDS	
1.01.08.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.700.000,00		
1.01.08.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			20.700.000,00		
1.01.08.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.000.000,00		
1.01.08.5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk			700.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.90.	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa		1	Tahun	21.496.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.90	Belanja Pegawai				21.496.000,00	
1.01.90	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				21.496.000,00	
1.01.90	Tunjangan Keluarga				6.000.000,00	
1.01.90	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa				7.716.000,00	
1.01.90	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa				2.500.000,00	
1.01.90	Uang Makan				5.280.000,00	
1.01.91.	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa		1	Tahun	160.380.000,00	PAD, PBH
1.01.91.	Belanja Pegawai				160.380.000,00	
1.01.91.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				160.380.000,00	
1.01.91.	Tunjangan Keluarga				35.400.000,00	
1.01.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa				50.700.000,00	
1.01.91.	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa				16.200.000,00	
1.01.91.	Uang Makan				58.080.000,00	
1.01.92.	Tunjangan Kinerja BPD		1	Tahun	6.000.000,00	PAD
1.01.92	Belanja Pegawai				6.000.000,00	
1.01.92	Tunjangan BPD				6.000.000,00	
1.01.92	Tunjangan Kinerja BPD				6.000.000,00	
1.01.93.	Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		2	Orang	30.000.000,00	PBH
1.01.93	Belanja Pegawai				30.000.000,00	
1.01.93	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				20.000.000,00	
1.01.93	Tunjangan Kepala Desa				20.000.000,00	
1.01.93	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				10.000.000,00	
1.01.93	Purna Bakti Perangkat Desa				10.000.000,00	
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				73.776.700,00	
1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		5	Paket	34.000.000,00	PBH

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			34.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			34.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			25.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebeair dan Aksesoris Ruangn			9.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Paket	5.000.000,00	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			5.000.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	1	Paket	10.000.000,00	PBH
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			10.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			1.375.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			8.600.000,00	
1.02.03.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			25.000,00	
1.02.91.		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service:STNK;BPKB;dll)	3	Paket	24.778.700,00	PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.778.700,00	
1.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			11.000.000,00	
1.02.91.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			11.000.000,00	
1.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.778.700,00	
1.02.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			3.778.700,00	
1.02.91.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			10.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			1.500.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	1.500.000,00	PBH

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.03.02	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			1.500.000,00	
1.03.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.03.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			128.154.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDos (Reguler)	3	Paket	29.584.000,00	DDS, PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.584.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			15.468.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.234.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.246.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.018.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
1.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
1.04.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			150.000,00	
1.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			11.200.000,00	
1.04.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.200.000,00	
1.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			7.000.000,00	
1.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			736.000,00	
1.04.01.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			736.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	2	Paket	29.500.000,00	DDS, PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			21.000.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.452.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.548.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.050.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
1.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			150.000,00	
1.04.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			150.000,00	
1.04.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			250.000,00	
1.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.450.000,00	
1.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			6.450.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3	Paket	13.510.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.510.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			4.760.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.760.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.750.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.750.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			12.600.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			4.800.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.800.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.800.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.800.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Paket	1.200.000,00	PBH
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.200.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.200.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	3.760.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.07.	Belanja Barang Perliangkapan			2.010.000,00	
1.04.07.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.010.000,00	
1.04.07.	Belanja Jasa Honorarium			1.750.000,00	
1.04.07.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.750.000,00	
1.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pikkades, Penyarangan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	2	Paket	38.000.000,00	PBH
1.04.10	Belanja Barang dan Jasa			38.000.000,00	
1.04.10	Belanja Barang Perliangkapan			5.400.000,00	
1.04.10.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.400.000,00	
1.04.10	Belanja Jasa Honorarium			9.600.000,00	
1.04.10	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.600.000,00	
1.04.10	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.04.10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
1.04.10.	Belanja Operasional Perkantoran			20.000.000,00	
1.04.10	Belanja Jasa Pendampingan Hukum			20.000.000,00	
01.05.	Sub Bidang Pertanian			131.558.000,00	
1.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	Paket	550.000,00	PBH
1.05.01.	Belanja Modal			550.000,00	
1.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			550.000,00	
1.05.01.	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah			550.000,00	
1.05.90.	Belanja Jasa Perpanjangan/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	1	Paket	4.200.000,00	PBH
1.05.90.	Belanja Barang dan Jasa			4.200.000,00	
1.05.90	Belanja Operasional Perkantoran			4.200.000,00	
1.05.90.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			4.200.000,00	
1.05.91.	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5	Paket	126.808.000,00	PBH
1.05.91.	Belanja Barang dan Jasa			126.808.000,00	
1.05.91.	Belanja Barang Perliangkapan			21.298.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.200.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.785.000,00	
1.05.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.273.000,00	
1.05.91.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.040.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
1.05.91.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			300.000,00	
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.800.000,00	
1.05.91.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			14.300.000,00	
1.05.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			11.500.000,00	
1.05.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			11.500.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			76.110.000,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			76.110.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			424.014.001,90	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			19.400.000,00	
2.01.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1	Paket	2.000.000,00	DDS
2.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.000.000,00	
2.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00	
2.01.06.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2	Paket	17.400.000,00	DDS
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.400.000,00	
2.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.400.000,00	
2.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
2.01.06.	5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2 01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Langganan Listrik Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	7	Paket	400.000,00	DDS
2 01.08.	5.2.2.				14.400.000,00	
2 01.08.	5.2.2.05				14.400.000,00	
2 01.08.	5.2.5.				600.000,00	
2 01.08.	5.2.5.01				600.000,00	
02.02.					321.889.001,90	
2.02.02.					203.894.893,90	
2.02.02.	5.2.				203.894.893,90	
2.02.02.	5.2.1.				156.269.893,90	
2.02.02.	5.2.1.01				6.263.200,00	
2.02.02.	5.2.1.05	3.098.893,90				
2.02.02.	5.2.1.06	133.179.000,00				
2.02.02.	5.2.1.08	3.728.800,00				
2.02.02.	5.2.1.10	10.000.000,00				
2.02.02.	5.2.3.	45.000.000,00				
2.02.02.	5.2.3.90	45.000.000,00				
2.02.02.	5.2.7.	2.625.000,00				
2.02.02.	5.2.7.91	2.625.000,00				
2.02.03.		11.000.000,00	1	Paket	11.000.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perengkapan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Perjalanan Dinas			11.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.				2.500.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06				2.200.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08				300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.				500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04				500.000,00	
2.02.03.	5.2.3.				2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.000.000,00	
2.02.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
2.02.03	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			6.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4	Paket	41.400.000,00	DDS
2.02.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.400.000,00	
2.02.04	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			5.750.000,00	
2.02.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			682.000,00	
2.02.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.470.000,00	
2.02.04	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			298.000,00	
2.02.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
2.02.04	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
2.02.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.550.000,00	
2.02.04	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			150.000,00	
2.02.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			20.700.000,00	
2.02.04	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			20.700.000,00	
2.02.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.000.000,00	
2.02.04	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			8.000.000,00	
2.02.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.700.000,00	
2.02.04	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			700.000,00	
2.02.04	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komur			1.000.000,00	
2.02.04	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.650.000,00	
2.02.04	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			1.650.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	12.594.108,00	DDS
2.02.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.594.108,00	
2.02.06	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			7.377.108,00	
2.02.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.06.	3				
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			309.108,00	
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi. (Makan/Minum)			6.400.000,00	
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			248.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.300.000,00	
5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.300.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			297.000,00	
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			297.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			620.000,00	
5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			620.000,00	
2.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2	Paket	9.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.500.000,00	
5.2.1.02	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik			1.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.000.000,00	
5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			4.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.500.000,00	
5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.500.000,00	
5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			2.000.000,00	
2.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6	Paket	10.000.000,00	DDS
5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.000.000,00	
5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			5.000.000,00	
5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			5.000.000,00	
2.02.91.	Dukungan Pencegahan/Penganganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	2	Paket	34.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			18.298.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.02.91.	Belanja Barang Konsumsi: (Makan/Minum)			17.554.000,00	
2.02.91.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			744.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Honorarium			3.700.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Honorarium Juni Lomba			2.100.000,00	
2.02.91.	Belanja Perjalanan Dinas			2.800.000,00	
2.02.91.	Belanja Bantuan Transport			2.800.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Sewa			3.550.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			3.550.000,00	
2.02.91.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.152.000,00	
2.02.91.	Belanja Hadiah Kegiatan			5.152.000,00	
2.02.91.	Belanja Modal			500.000,00	
2.02.91.	Belanja Modal Lainnya			500.000,00	
2.02.91.	Belanja Khusus Olahraga			500.000,00	
2.02.91.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			67.145.000,00	
02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1	Paket	67.145.000,00	DDS, PBH
2.03.11.	Belanja Barang dan Jasa			1.145.000,00	
2.03.11.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			145.000,00	
2.03.11.	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			145.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal			66.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			66.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			38.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			26.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			600.000,00	
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			15.580.000,00	
2.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3	Paket	5.580.000,00	DOS, PBH
2.06.02.	Belanja Barang dan Jasa			5.580.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Peringkapan			2.700.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
2.06.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
2.06.02.	Belanja Operasional Perkantoran			2.880.000,00	
2.06.02.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.880.000,00	
2.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	Paket	10.000.000,00	PBH
2.06.03.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.06.03.	Belanja Operasional Perkantoran			9.710.000,00	
2.06.03.	Belanja Jasa Langganan Internet			9.600.000,00	
2.06.03.	Belanja Jasa Domain Desa			110.000,00	
2.06.03.	Belanja Pemeliharaan			290.000,00	
2.06.03.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komun)			290.000,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			206.800.000,00	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			16.800.000,00	
3.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Paket	2.000.000,00	PBH
3.01.01.	Belanja Modal			2.000.000,00	
3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.000.000,00	
3.01.01.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			2.000.000,00	
3.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Kertertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1	Paket	14.800.000,00	PBH
3.01.03.	Belanja Barang dan Jasa			14.800.000,00	
3.01.03.	Belanja Barang Peringkapan			9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
3 01 03	5.2.1.08			8 670 000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				
3 01 03	5.2.1.08			930 000,00	
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				
3 01 03	5.2.3.			5 200 000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				
3 01 03	5.2.3.01			1 000 000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				
3 01 03	5.2.3.90			4 200 000,00	
	Belanja Bantuan Transport				
03.02.				150.800.000,00	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
3.02.03.				122.000.000,00	DDS, PBH
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)				
3 02 03	5.2.			122.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				
3 02 03	5.2.1.			33 850 000,00	
	Belanja Barang Perengkapan				
3 02 03	5.2.1.02			5 000 000,00	
	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik				
3 02 03	5.2.1.05			2 000 000,00	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
3 02 03	5.2.1.06			22 354 000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				
3 02 03	5.2.1.08			4 450 000,00	
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				
3 02 03	5.2.2.			8 000 000,00	
	Belanja Jasa Honorarium				
3 02 03	5.2.2.04			3 500 000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				
3 02 03	5.2.2.05			4 500 000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Petugas				
3 02 03	5.2.3.			3 650 000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				
3 02 03	5.2.3.90			3 650 000,00	
	Belanja Bantuan Transport				
3 02 03	5.2.4.			70 500 000,00	
	Belanja Jasa Sewa				
3 02 03	5.2.4.02			70 500 000,00	
	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan				
3 02 03	5.2.7.			6 000 000,00	
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				
3 02 03	5.2.7.91			6 000 000,00	
	Belanja Hadiah Kegiatan				
3.02.90.			2	28.800.000,00	PBH
	Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)		Paket		
3 02 90	5.2.			28 800 000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				
3 02 90	5.2.2.			28 800 000,00	
	Belanja Jasa Honorarium				
3 02 90	5.2.2.05			28 800 000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Petugas				

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
3.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		1	Paket	7.200.000,00	PBH
3.03.06	Belanja Barang dan Jasa				7.200.000,00	
3.03.06	Belanja Barang Perengkapan				5.760.000,00	
3.03.06	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1.200.000,00	
3.03.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				4.260.000,00	
3.03.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				300.000,00	
3.03.06	Belanja Perjalanan Dinas				1.440.000,00	
3.03.06	Belanja Bantuan Transport				1.440.000,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				32.000.000,00	
3.04.03.	Pembinaan PKK				25.000.000,00	PBH
3.04.03	Belanja Barang dan Jasa				25.000.000,00	
3.04.03	Belanja Barang Perengkapan				10.180.000,00	
3.04.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				2.000.000,00	
3.04.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				7.280.000,00	
3.04.03	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				900.000,00	
3.04.03	Belanja Jasa Honorarium				500.000,00	
3.04.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				500.000,00	
3.04.03	Belanja Perjalanan Dinas				10.720.000,00	
3.04.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				6.720.000,00	
3.04.03	Belanja Bantuan Transport				4.000.000,00	
3.04.03	Belanja Jasa Sewa				1.600.000,00	
3.04.03	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan				1.600.000,00	
3.04.03	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				2.000.000,00	
3.04.03	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				2.000.000,00	
3.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		1	Paket	7.000.000,00	PBH

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
3.04.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
3.04.04.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.800.000,00	
3.04.04.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
3.04.04.5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.04.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
3.04.04.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
3.04.04.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
3.04.04.5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.000.000,00	
3.04.04.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.300.000,00	
3.04.04.5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.300.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			244.726.000,00	
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			229.726.000,00	
4.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	Paket	20.000.000,00	DDS
4.02.01.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
4.02.01.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			15.000.000,00	
4.02.01.5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			15.000.000,00	
4.02.01.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
4.02.01.5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			5.000.000,00	
4.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			60.000.000,00	DDS
4.02.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.000.000,00	
4.02.04.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			34.000.000,00	
4.02.04.5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			27.000.000,00	
4.02.04.5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			7.000.000,00	
4.02.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.000.000,00	
4.02.04.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			26.000.000,00	
4.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Paket	149.726.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
4.02.06	Belanja Barang dan Jasa			2.456.000,00	
4.02.06	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	
4.02.06	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.200.000,00	
4.02.06	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			256.000,00	
4.02.06	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			256.000,00	
4.02.06	Belanja Modal			147.270.000,00	
4.02.06	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			147.270.000,00	
4.02.06	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
4.02.06	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			85.050.000,00	
4.02.06	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			60.320.000,00	
4.02.06	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.000.000,00	
4.02.06	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			15.000.000,00	
04.04.					
4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2	Paket	15.000.000,00	DDS
4.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Perengkapan			7.600.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.020.000,00	
4.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			580.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			300.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			300.000,00	
4.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
4.04.01.	Belanja Bantuan Transport			5.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			176.000.000,00	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			22.000.000,00	
5.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana			22.000.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			22.000.000,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			22.000.000,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			22.000.000,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			10.000.000,00	
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	1	Paket	10.000.000,00	DDS
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			144.000.000,00	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	144.000.000,00	DDS
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			144.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			144.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA			2.408.841.247,06	
	SURPLUS DEFISIT			100.701.357,94	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			84.038.642,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			84.038.642,06	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			84.038.642,06	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			184.740.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			184.740.000,00	
6.2.9.99	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			184.740.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			100.701.357,94	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1		4	5	6	7
2					
	SISA LEBIH(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Kupang, 29 Desember 2025
 KEPALA DESA
 KUPANG
 MUKHAMAD

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA KUPANG KECAMATAN JABON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.509.542.605,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			85.416.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			1.000.000,00
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			1.000.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun 1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			84.416.000,00
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			84.416.000,00
	01. Hasil Sewa Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun 84.416.000,00	84.416.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.444.126.605,00
4.2.1.	Dana Desa			1.058.417.000,00
4.2.1.01	Dana Desa			1.058.417.000,00
	01. Dana Desa	DOS	1 Tahun 1.058.417.000,00	1.058.417.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			813.298.160,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			813.298.160,00
	01. BHP	PBH	1 Tahun 784.943.496,00	784.943.496,00
	02. BHR	PBH	1 Tahun 28.354.664,00	28.354.664,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			572.411.445,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			572.411.445,00
	01. ADD SILTAP	ADD	1 Tahun 448.800.000,00	448.800.000,00
	02. ADD OPERASIONAL	ADD	1 Tahun 123.611.445,00	123.611.445,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank 2025	DLL	1 Tahun 0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN				2.509.542.605,00



Kupang, 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

SURATMAN

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/
PEMERINTAH DESA KUPANG KECAMATAN JABON
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			84.038.642,06
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			84.038.642,06
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			84.038.642,06
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa PAD	1 Ls	0,00	0,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	13.140,33	13.140,33
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN) DDS	1 Ls	56.482.001,90	56.482.001,90
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Ls	22.484.903,68	22.484.903,68
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota PBK	1 Ls	200.717,00	200.717,00
	08. SILPA Bunga Bank 2025 DLL	1 Tahun	4.857.879,15	4.857.879,15
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			184.740.000,00
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			184.740.000,00
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			184.740.000,00
	01. Dukungan Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih DDS	1 Ls	184.740.000,00	184.740.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			100.701.357,94



Kupang, 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

(Signature)
SURATMAN

KEPUTUSAN CAMAT JABON
NOMOR : 100/2185/438.7.17/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA (RAPERDES)
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN JABON**

Jalan Majapahit No 01 Dukuhsari Jabon
Telepon. 0343852008

Email : jabon@sidoarjokab.go.id Website : jabon.sidoarjokab.go.id

**KABUPATEN SIDOARJO
KEPUTUSAN CAMAT JABON
NOMOR: 100/2185/438.7.17/2025**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA (RAPERDes)
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JABON

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023.
- b. Bahwa berdasarkan Bab IV Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (RAPERDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kupang Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Camat Jabon.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 seri D).

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 77 tahun 2018 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 03).

MEMPERHATIKAN: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 400.10.2.4/15634/438.5.8/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Pedoman Penyusunan Pedes APBDes Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (RAPERDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kupang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

KESATU	I. Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 65.416.000,00
	b. Pendapatan Transfer	: Rp. 2.444.126.605,00
	- Dana Desa	: Rp. 1.058.417.000,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 813.298.160,00
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 572.411.445,00
	- Bantuan Keuangan Propinsi	: Rp. 0,00
	- Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp. <u>0,00</u> +
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.509.542.605,00
KEDUA	II. Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemdes	: Rp. 1.357.301.245,16
	b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 424.014.001,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasy.	: Rp. 206.800.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masy.	: Rp. 244.726.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp. <u>176.000.000,00</u> +
	Jumlah Belanja	Rp. 2.408.841.247,06
	Surplus/Defisit	Rp. 100.701.357,94
KETIGA	III. Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	1) Silpa Tahun Sebelumnya	: Rp. 84.038.642,06
	2) Pencairan Dana Cadangan	: Rp. 0,00
	3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	: Rp. 0,00
	4) Penerimaan Pinjaman Desa	: Rp. <u>0,00</u> +
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 84.038.642,06
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	1) Pembentukan Dana Cadangan	: Rp. 0,00
	2) Penyertaan Modal Desa	: Rp. 0,00
	3) Pengeluaran Pemb. lainnya	: Rp. 184.740.000,00
	4) Pembayaran Utang	: Rp. <u>0,00</u> +
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 184.740.000,00
	Pembiayaan Netto (a-b)	Rp. 100.701.357,94
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: Rp. 0,00

- KEEMPAT** : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa (RAPERDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kupang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa (RAPERDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KEENAM** : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUJUH** : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kupang Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jabon
Pada Tanggal : 28 Desember 2025

Pit. CAMAT JABON



Ditandatangani secara elektronik oleh

ABDUL ROKHIM, SH
NIP. 196902211997031005

ABDUL ROKHIM, SH

Pembina (IV/a)

NIP 196902211997031005

HASIL EVALUASI CAMAT JABON
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA (RAPERDes) TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

Bahwa evaluasi ini dilakukan terhadap Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kupang Tahun Anggaran 2026 Hasil dari Aplikasi Siskeudes 2.08 Tahun 2026 yang meliputi Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pendapatan Asli Desa Kupang dari Hasil Aset Desa sebesar Rp. **65.416.000,00** terdiri dari;
 1. Bagi Hasil BUMDes Rp. 1.000.000,00
 2. Hasil Sewa Tanah TKD Rp. 64.416.000,00
- b. Bahwa Pendapatan Transfer sebesar Rp. **2.444.126.605,00**;
- c. Bahwa Dana Desa sebesar Rp. **1.058.417.000,00**;
- d. Bahwa Maksimal 3% (Tiga Persen) dari Dana Desa tersebut pada point c adalah sebesar Rp. **20.700.000,00** digunakan sebagai Operasional Pemerintah Desa;
- e. Bahwa BLT DD Maksimal 15% (Lima Belas Persen) dari Dana Desa tersebut pada point c adalah dianggarkan sebesar Rp. **144.000.000,00** dengan jumlah penerima sebanyak 40 (Empat Puluh) KPM;
- f. Bahwa Minimal 15% Dana BHP untuk Optimalisasi Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. **126.808.000,00**;
- g. Bahwa Silpa Tahun sebelumnya Rp. **84.038.642,06** dengan rincian sebagai berikut:
 1. Silpa ADD sebesar Rp. 13.140,33
 2. Silpa DD sebesar Rp. 56.482.001,90
 3. Silpa DLL sebesar Rp. 4.857.879,15
 4. Silpa PBH sebesar Rp. 22.484.903,68
 5. Silpa PBK sebesar Rp. 200.717,00
- h. Bahwa Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Kupang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
 1. Total Belanja sebesar Rp. 2.408.841.247,06
 2. Belanja Operasional sebesar Rp. 614.434.000,00
 3. Belanja Non Operasional sebesar Rp. 1.794.407.247,06
 4. Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa
 5. Dari Keterangan tersebut diatas diperoleh sebagai berikut :

Komposisi Belanja Operasional	sebesar	25,51 %
Komposisi Biaya Non Operasional	sebesar	74,49 %

Ditetapkan di : Jabon
Pada Tanggal : 28 Desember 2025

Pit. **CAMAT JABON**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ABDUL ROKHIM, SH
NIP. 196902211997031005

ABDUL ROKHIM, SH
Pembina (IV/a)
NIP 196902211997031005



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
 PEMERINTAH DESA KUPANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES : APBDes Awal

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	808.636.000,00		590.760.000,00	73,06	217.876.000,00	26,94
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.153.885.247,06		23.674.000,00	2,05	1.130.211.247,06	97,95
5.3.	Belanja Modal	270.320.000,00		0,00	0,00	270.320.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.000.000,00		0,00	0,00	176.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.408.841.247,06		614.434.000,00	25,51	1.794.407.247,06	74,49

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional 25,51 %

Komposisi Belanja Non Operasional 74,49 %

Tim Evaluasi APBDes

Paraf : 
 Nama : DIAKHA MUSFIDAH, S.SOS.
 NIP : 197811022010012002

Paraf : 
 Nama : ABDUL ROKHIM, SH
 NIP : 196902241997031005

Paraf : 
 Nama : ABDUL ROKHIM, SH
 NIP : 196902241997031005

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDes :

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATENKOTA : KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN : KECAMATAN JABON
DESA : PEMERINTAH DESA KUPANG

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujuan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : 19 Desember 2025</p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi Nama : NIP :ABDULROKHM: SH Jabatan : NIP:196902211997031005</p>					



KEPUTUSAN BPD

NOMOR : 07

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA (APBDes) KUPANG

TAHUN ANGGARAN 2026



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUPANG
KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 118/07/BPD.KPG/XII/2025**

T E N T A N G

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KUPANG**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai dengan pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember;
 - b. Bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kupang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Kupang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
22. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
33. Peraturan Desa Kupang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kupang Tahun 2020 Nomor 03);
34. Peraturan Desa Kupang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kupang Periode 2018 - 2024 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2018 Nomor 03) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Desa Kupang Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kupang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2018-2026 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2024 Nomor 2);
35. Peraturan Desa Kupang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kupang Tahun 2026 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2025 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kupang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kupang Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA :** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kupang Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :
- 1) Pendapatan Desa : Rp. 2.509.542.606,00
 - 2) Belanja Desa : Rp. 2.408.841.247,06
 - 3) Defisit/Surplus : Rp. 100.701.357,94
 - 4) Silpa Tahun 2025 : Rp. 84.038.642,06
 - 5) Pembiayaan Desa : Rp. 184.701.357,94
 - 6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp. 0,00
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 18 Desember 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KUPANG**

